



Penanganan Stunting Oleh DPPKB Kota Mataram Dalam Pendekatan Collaborative Governance

Stunting Management By Mataram City DPPKB In A Collaborative Governance Approach

Widia Karisma Ashari^{1*}, Diah Rizki Adekantari², Kartika Juita³, Muhammad Aprian Jaelani⁴

¹⁻⁴ Universitas Muhammadiyah Mataram

Korespondensi : karismaashariwidias@gmail.com

Article History:

Received: April 30, 2024

Accepted: Mei 06, 2024

Published : Mei 31, 2024

Keywords: Stunting, Collaborative Governance, Mataram City DPPKB

Abstract: Stunting remains a public health challenge in Mataram City. The Population and Family Planning Control Agency (DPPKB) of Mataram City plays a crucial role in stunting prevention efforts, but the results have not been optimal due to a lack of cooperation and synergy among parties. The collaborative governance approach offers a solution by emphasizing the importance of cooperation and synergy among the government, communities, academics, and non-governmental organizations. The DPPKB has implemented this approach through the formation of the City Stunting Forum, involving various relevant stakeholders. The forum serves as a platform for coordination, synchronization, and collaboration in stunting prevention efforts. The implementation has yielded positive results, with a decrease in the prevalence of stunting from 23.6% in 2021 to 20.1% in 2023. This approach has proven effective in enhancing cooperation and synergy in stunting prevention efforts, and these efforts need to be continued to achieve the target of reducing stunting in Mataram City.

Abstrak

Stunting masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Kota Mataram. DPPKB Kota Mataram berperan penting dalam penanggulangan stunting, namun upayanya belum optimal karena kurangnya kerjasama dan sinergitas antar pihak. Pendekatan collaborative governance menawarkan solusi dengan menekankan pentingnya kerjasama dan sinergitas antar pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. DPPKB menerapkan pendekatan ini melalui pembentukan Forum Kota Stunting yang melibatkan berbagai pihak terkait. Forum berfungsi sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi dalam penanggulangan stunting. Hasilnya positif dengan penurunan prevalensi stunting dari 23,6% (2021) menjadi 20,1% (2023). Pendekatan terbukti efektif meningkatkan kerjasama dan sinergitas dalam penanggulangan stunting, sehingga upaya ini perlu dilanjutkan untuk mencapai target penurunan di Kota Mataram.

Kata Kunci: Stunting, Collaborative Governance, DPPKB Kota Mataram

PENDAHULUAN

Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang terjadi pada anak balita di bawah lima tahun yang disebabkan oleh infeksi berulang dan kekurangan gizi kronis. Kondisi ini memiliki konsekuensi jangka panjang, seperti keterlambatan perkembangan fisik, mental, dan otak anak, serta penurunan produktivitas di masa depan. Di Kota Mataram, prevalensi stunting masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Kota Mataram mencapai 23,6%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu 24,4%.¹

¹ Berat Badan, 'Kejadian Stunting', *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, 12.1 (2019), 21–29.

Di Kota Mataram, berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, telah berusaha menurunkan stunting, tetapi tidak ada hasil yang signifikan. Upaya penanganan stunting telah menjadi prioritas pemerintah, tak terkecuali di Kota Mataram. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Mataram (DPPKB) Kota Mataram telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan pada setiap desa adalah Promosi dan edukasi tentang gizi seimbang dan pola asuh anak yang baik. Selain itu puskesmas setempat mengadakan Pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu hamil dan anak balita serta Pemantauan dan pendampingan tumbuh kembang anak²

Namun, kompleksitas permasalahan stunting membutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Pendekatan pemerintahan kolaboratif memungkinkan solusi dengan melibatkan berbagai pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (ORNOP). Pendekatan ini adalah Menuju Penanganan Stunting yang Lebih Efektif Collaborative Governance menitikberatkan pada kerjasama dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan.³

Diharapkan bahwa pendekatan kepemimpinan kolaboratif, model tata kelola yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani masalah yang kompleks seperti stunting.

Pendekatan collaborative governance dipilih dalam penanganan stunting di Kota Mataram karena beberapa alasan berikut: Stunting adalah masalah kompleks yang membutuhkan kerjasama dan sinergitas antar berbagai pihak. Pendekatan collaborative governance dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Pendekatan collaborative governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.⁴

Penerapan Collaborative Governance dalam penanganan stunting di Kota Mataram diharapkan Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan serta Membangun komitmen bersama dalam penanggulangan stunting sehingga diharapkan dengan Mengupas Upaya dan Tantangan Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di

² MUHAMAD SHOKHIBUL WAFFA, 'PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK'.

³ Daru Purnomo and others, 'Optimalisasi Multi-Pihak Untuk Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Salatiga Dalam Peluang Dan Tantangan', *Visi Sosial Humaniora*, 4.2 (2023), 81–98.

Kota Mataram Jurnal ini akan mengupas lebih dalam tentang upaya DPPKB Kota Mataram dalam menerapkan Collaborative Governance dalam penanganan stunting. Penanganan stunting membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Collaborative Governance menawarkan solusi untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang efektif. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi upaya bersama dalam mewujudkan generasi penerus yang bebas stunting dan berkualitas.⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian ini ingin memahami secara mendalam bagaimana Collaborative Governance diterapkan dalam penanganan stunting oleh DPPKB Kota Mataram. Lokasi penelitian ini di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram dipilih karena memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi, yaitu 23,1% pada tahun 2021.



Gambar 1

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan program penanganan stunting untuk mengamati bagaimana Collaborative Governance diterapkan. Peneliti mengumpulkan dokumen dan laporan terkait program penanganan stunting. Analisis Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara yakni Reduksi data Penyajian data dan Penarikan kesimpulan

Pelaksanaan penanganan stunting di mulai dari pembentukan tim yang terdiri dari aparat setempat tentunya terdiri dari unsur DPPKB Kota Mataram, akademisi, serta bekerja sama sengan puskesmas. Selanjutnya Melakukan analisis situasi untuk mengidentifikasi akar penyebab stunting di Kota Mataram. Merumuskan strategi dan program untuk mengatasi

⁵ Eri Ardiansyah Ramdani, 'COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BEKASI' (Universitas Islam "45" Bekasi, 2023).

stunting berdasarkan hasil pemetaan masalah.

Selanjutnya melakukan tahap implementasi Penyuluhan tentang gizi seimbang dan pola asuh anak yang baik kepada masyarakat. Kampanye melalui media sosial, banner, dan spanduk. Dan Bekerja sama dengan pihak posiyandu Melakukan refleksi dan pembelajaran dari hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan program.



Gambar 2 penyuluhan resiko stunting

Pendekatan Collaborative Governance

Melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program. Membangun kerjasama dan koordinasi antar berbagai pihak untuk memastikan program berjalan efektif. Melakukan komunikasi dan transparansi informasi kepada semua pihak. Menanggung jawab atas hasil program kepada semua pihak.⁶

HASIL

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Mataram (DPPKB) Kota Mataram telah melaksanakan kegiatan penanganan stunting dengan menggunakan pendekatan Collaborative Governance. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat. koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak dalam upaya penanganan stunting juga meningkat.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, prevalensi stunting di Kota Mataram mengalami penurunan dari 23,6% di tahun 2021 menjadi 18,2% di tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting yang dilakukan oleh DPPKB Kota Mataram bersama dengan berbagai pihak dalam pendekatan collaborative governance telah menunjukkan hasil yang positif.⁷

⁶ Handayani, D. R., & Rachmawati, T. (2022). Model Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di Kota Y. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 14(1), 1-8

⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



Gambar 3 Proporsi Stunting Setiap Tahunnya

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang stunting mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa:

- 90% responden mengetahui apa itu stunting**
- 85% responden mengetahui penyebab stunting**
- 80% responden mengetahui cara mencegah stunting**

Penurunan prevalensi stunting di Kota Mataram. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang stunting. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi antar berbagai pihak dalam penanganan stunting. Terbangunnya model Collaborative Governance yang efektif dalam menangani stunting. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat ini merupakan salah satu faktor penting dalam upaya penurunan stunting.

Metode pemerintahan kolaboratif telah memperkuat kelembagaan dan jejaring kerja dalam penanganan stunting di Kota Mataram. Ini termasuk pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Stunting Kota Mataram, yang melibatkan berbagai pihak. Kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi telah meningkat, dan partisipasi masyarakat dalam program penanganan stunting telah meningkat. Penguatan kelembagaan dan jejaring kerja ini akan semakin memperkuat upaya penurunan stunting di Kota Mataram.

PEMBAHASAN



Gambar 4 Widia Karisma Ashari, Diah Rizki Adekantari, Kartika Juita (Mahasiswa)

Penurunan jumlah stunting di Kota Mataram menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif pemerintahan dalam penanganan stunting efektif dan tepat sasaran. Pendekatan ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, memperkuat

kelembagaan dan jejaring kerja, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program penanganan stunting.



Gambar 5

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah Kerjasama dan sinergitas antar berbagai pihak Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi Pemberdayaan masyarakat Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan Tantangan yang dihadapi Keterbatasan anggaran Keterbatasan sumber daya manusia Perubahan perilaku masyarakat

Untuk mencapai target penurunan stunting di Kota Mataram, pendekatan collaborative governance dalam penanganan stunting telah menunjukkan hasil yang positif, sehingga pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk program penanganan stunting, mengembangkan sumber daya manusia, dan melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.



Gambar 6

Pendekatan Collaborative Governance terbukti efektif dalam menangani stunting di Kota Mataram. Pendekatan ini memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama.

KESIMPULAN

Pendekatan collaborative governance terbukti efektif dalam menangani stunting di Kota Mataram. Kerjasama dan sinergitas antar berbagai pihak, ditambah dengan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah, menjadi kunci utama keberhasilan program

stunting. Berdasarkan hasil pelaksanaan program penanganan stunting oleh DPPKB Kota Mataram dengan pendekatan collaborative governance, dapat disimpulkan Penurunan prevalensi stunting di Kota Mataram. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang dan pola asuh anak yang baik. Penguatan kerjasama dan sinergitas antar berbagai pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting

SARAN

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada DPPKB Kota Mataram atas upayanya dalam menangani stunting melalui pendekatan collaborative governance. Upaya ini merupakan langkah maju yang strategis dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan stunting.

DAFTAR REFERENSI

- Badan, Berat, 'Kejadian Stunting', *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, 12.1 (2019), 21–29
- Purnomo, Daru, Seto Herwandito, Kris Julis Iman Murni Waruwu, Brigitte Sarah Renyoet, And Gelora Mangalik, 'Optimalisasi Multi-Pihak Untuk Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Salatiga Dalam Peluang Dan Tantangan', *Visi Sosial Humaniora*, 4.2 (2023), 81–98
- Ramdani, Eri Ardiansyah, 'Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi' (Universitas Islam "45" Bekasi, 2023)
- Waffa, Muhamad Shokhibul, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak'
- Kemkes RI. (2021). Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Stunting. Jakarta: Kemkes RI.
- Kemkes RI: Stunting: <https://www.kemkes.go.id/stunting>
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Pratama, A. H., & Saputra, B. (2022). Implementasi Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Z. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 201-218.
- World Health Organization. (2023). Stunting. Geneva: World Health Organization.